



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUPUTA**
2. Jabatan : **KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HAMA TANAMAN**
3. NHK : **1003085**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.896.500.000**

1. Tanah Seluas 4.945 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 2.472.500.000
2. Tanah Seluas 915 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 915.000.000
3. Tanah Seluas 1.108 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , WARISAN Rp. 554.000.000
4. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
5. Tanah Seluas 3.100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , WARISAN Rp. 3.100.000.000
6. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Bangunan Seluas 92 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , WARISAN Rp. 135.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 101.000.000**

1. MOBIL, FORD FORD ECOSPORT 1.5L (4X2) AT-TITANIUM Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11A 3CB AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



3. MOTOR, HONDA D1BO2N13L2 R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 41.850.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 457.144.027

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.496.494.027

III. HUTANG

Rp. 104.705.482

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.391.788.545

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.